

## **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GUNUNGPATI**

**Oleh: Oktaviani Adhi Suciptaningsih**  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

### ***Abstract***

*Schools can take a strategic role in the implementation of anti-corruption education, especially in a culture of anti-corruption behavior among students. This study has the objective to know the anti-corruption education for elementary school students in the Kecamatan Gunungpati. This research was conducted using qualitative methods, descriptive analytical. Data collection techniques used were interviews, observation and documents. Analysis of data using qualitative research phases according to Spradley. While in checking the validity of the data using a data triangulation techniques. The results showed that the implementation of anti-corruption education for elementary school students in the Kecamatan Gunungpati divided into two strategies that are inclusive (inserted in various subjects) and exclusive (extracurricular student). Implementation of anti-corruption education for elementary students in the Kecamatan Gunungpati have not been maximized due to various constraints, such that not all teachers follow the dissemination of anti-corruption education so have limited knowledge about planting and how effective anti-corruption education and efficient for elementary students and the lack of facilities and infrastructure supporters of anti-corruption education for students in elementary school. The impact of the implementation of anti-corruption education for elementary school students is increasing student achievement both in the classroom and outside the classroom, because students are accustomed to being kind, including honest, disciplined, caring, brave, responsible, and so forth. The conclusion is that the implementation of anti-corruption education should be internalized to the students at an early age in order to get used to conduct anti-corruption measures. Required examples from various sides for maximum results.*

### **Abstrak**

Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi di kalangan siswa. Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar di Kecamatan Gunungpati. Metode yang digunakan adalah kualitatif, di mana data berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian yang digunakan adalah subyek penelitian, informan dan dokumen. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan tahapan analisis

data Spreadley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SD di Kecamatan Gunungpati terbagi menjadi dua strategi yakni secara inklusif (disisipkan dalam berbagai mata pelajaran) dan eksklusif (ekstrakurikuler kesiswaan). Pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SD di Kecamatan Gunungpati belum bisa maksimal karena berbagai kendala, diantaranya yakni belum semua guru mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi sehingga memiliki keterbatasan mengenai pengetahuan dan cara penanaman pendidikan anti korupsi yang efektif dan efisien bagi siswa SD dan minimnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan anti korupsi bagi siswa di SD. Dampak pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SD adalah meningkatnya prestasi siswa baik di kelas maupun di luar kelas, sebab siswa terbiasa untuk bersikap baik, diantaranya jujur, disiplin, peduli, berani, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi harus diinternalisasikan kepada siswa sejak usia dini agar terbiasa melakukan tindakan yang anti korup. Diperlukan keteladanan dari berbagai pihak agar hasilnya maksimal.

**Kata Kunci:** Pendidikan Anti Korupsi, Siswa Sekolah Dasar

Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara untuk memberantas korupsi diantaranya dengan melakukan upaya pencegahan tindak korupsi, namun hal tersebut belum mampu secara sistematis mengurangi praktek dan perilaku koruptif. Praktek korupsi masih terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta di Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan serta di sebagian kehidupan masyarakat lainnya. Upaya-upaya kuratif memang memberikan hasil seketika, namun karena spektrum perilaku korupsi yang luas maka diperlukan upaya lain yang hasilnya tidak bisa dilihat sekarang, yakni melalui pendidikan anti korupsi.

Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi di kalangan siswa. Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anti korupsi telah dilakukan di berbagai negara, negara-negara di Amerika, Eropa, Asia, Afrika maupun Australia. Di dunia telah dibentuk juga jaringan kerjasama antar-negara untuk memperkenalkan program pendidikan anti korupsi. Salah satu contoh pendidikan korupsi di Cina, yakni melalui China *on-line*, seluruh siswa di seluruh pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi yang tujuannya adalah memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi. Dalam jangka panjang generasi muda China bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi (Suyanto, 2005: 42).

Melalui pengembangan kultur sekolah, diharapkan siswa memiliki modal sosial untuk membiasakan berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi seyogyanya diberikan kepada anak-anak sejak di bangku sekolah dasar (SD). Anak-anak SD yang berusia antara 7 sampai dengan 12 tahun dapat berpikir transformasi *revesible* (dapat dipertukarkan) dan kekekalan (Disiree, 2008: 2). Mereka dapat

mengerti adanya perpindahan benda, mampu mengklasifikasi dalam level konkrit, mampu memahami persoalan sebab akibat yang bersifat konkrit. Oleh karenanya siswa SD dapat diperkenalkan suatu tindakan dengan akibat yang baik dan yang tidak baik.

Pentingnya pendidikan anti korupsi diberikan kepada siswa SD, yakni:

1. Siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang anti korupsi. Untuk itu, perlu diperkenalkan terlebih dahulu nilai-nilai konkrit yang diyakini akan dapat melawan tindakan korupsi.
2. Kurangnya keteladanan dari lingkungan (orang tua, guru, orang dewasa di sekitar dan media). Keteladanan dari orang-orang terdekat dan di sekitarnya akan sangat membantu dalam proses penanaman nilai atau budi pekerti yang diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.
3. Adanya kompetisi yang kurang sehat antar-siswa. Upaya menghindari kompetisi yang kurang sehat dalam pergaulan di sekolah dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai budaya di sekolah, seperti saling menghargai, saling menghormati, kesederhanaan dan tidak pamer. Bahkan jika perlu sekolah dapat memberi penghargaan kepada siswa yang berperilaku terpuji.
4. Sekolah tidak menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Itulah sebabnya aturan sekolah harus dibuat bersama antara guru, orang tua, dan siswa, supaya merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadapnya. Sementara itu, guru dan orang tua berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Jika ada yang melanggar aturan sekolah, yang bersalah harus diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pembelajaran di sekolah masih didominasi oleh aspek kognitif. Pembelajaran seperti ini kurang mampu membentuk karakter siswa. Untuk itu, perlu dikembangkan pembelajaran afektif yang bersifat aplikatif dengan model-model pembelajaran yang dikuasai guru, sehingga pembelajaran kognitif akan dapat dikawal untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah dasar. Metode dongeng, permainan (*games*), dan simulasi atau sosiodrama dapat diterapkan dalam pembelajaran afektif di sekolah (Handoyo, 2009: 7-8).

Berdasarkan hal di atas permasalahan ini menjadi sangat layak untuk dikaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian dengan judul: “**Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Gunungpati**”.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data berupa deskriptif analitis, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan menggunakan angka-angka untuk memperjelas keterangan yang diinginkan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SD N Ngijo 2, SD N Sekaran 1 dan SD N Sekaran 2 di Kecamatan Gunungpati. Informannya Kepala UPTD Kecamatan Gunungpati, Kepala Sekolah, TU, komite, dan orang tua siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi data, sedangkan teknik analisis menggunakan tahapan telaah data, reduksi data, penyusunan ke dalam satuan data, kategorisasi,

pemeriksaan keabsahan data, dan analisa dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan.

## **PEMBAHASAN**

Pada akhir dasawarsa 1990-an, salah satu jurnal terkemuka di Amerika “*Foreign Affairs*”, menyatakan bahwa korupsi telah menjadi *way of life* di Indonesia. Korupsi sudah menjadi cara atau jalan hidup bagi sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu *International Transparency*, pada tahun 1997, dalam laporannya menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia setelah Rusia dan Kolombia. Untuk itu diperlukan upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Salah satu kekeliruan upaya pemberantasan korupsi selama ini adalah terlalu fokus pada upaya menindak para koruptor. Sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi. Salah satunya lewat upaya pendidikan antikorupsi.

Menyadari hal ini, timbul gagasan memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tingkat SD hingga SMU, sebagai bentuk nyata pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Diharapkan pendidikan antikorupsi memberikan pengetahuan seputar korupsi dan bahayanya, mencetak daya manusia yang berkesadaran tinggi terhadap hukum, serta memutus mata rantai korupsi.

Pada tatanan SD pendidikan anti korupsi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh termasuk di SD-SD Kecamatan Gunungpati, di antaranya SD N Ngijo 2, SD N Sekaran 1 dan SD N Sekaran 2. Pendidikan anti korupsi di SD dilakukan dengan dua cara yakni secara inklusif (disisipkan melalui mata pelajaran) dan eksklusif (melalui ekstrakurikuler kesiswaan). Di lingkungan sekolah guru berusaha untuk memberi teladan yang baik mengenai pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi. Seperti yang dinyatakan oleh Wibowo (2013:38), bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi yang dalam proses tersebut, Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Jadi tidak hanya sekedar teori di kelas saja tetapi membutuhkan tindakan nyata/ contoh nyata yakni keteladanan dari semua pihak.

Guru di SD N Sekaran 2 memiliki kendala-kendala ketika akan melakukan pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi, diantaranya adalah bahwa keterbatasan pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi karena guru-guru di SD ini belum ada yang mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi dari KPK seperti guru SD N Ngijo 2 dan SD N Sekaran 1. Hal ini menjadi penting karena seperti yang dikatakan Hamalik (dalam Wibowo, 2013:126) bahwa guru akan mampu mengemban dan melaksanakan tanggungjawabnya khususnya dalam internalisasi pendidikan anti korupsi jika memiliki berbagai kompetensi yang relevan. Termasuk guru harus mempunyai pengetahuan mengenai pendidikan anti korupsi, guru harus menguasai

cara belajar yang efektif, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, dll. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat dua komponen penting, yaitu: (a) kemampuan penguasaan pengetahuan korupsi yang mencakup pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, penegakan dan pemberantasan korupsi, lembaga-lembaga anti korupsi, dan (b) kemampuan melaksanakan sikap anti korupsi misalnya tidak terlambat ke sekolah dan tidak mencontek. Selain itu terbatasnya sarana prasarana, seperti ketika hendak menempel slogan-slogan anti korupsi, mereka kesulitan karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya telah berupaya untuk menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi dalam ranah pendidikan dengan membuat komik dan modul bagi siswa maupun bagi guru dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, tetapi komik dan modul tersebut belum bias digunakan secara maksimal untuk menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang disampaikan kepada sekolah-sekolah dan juga karena biaya cetak komik yang lumayan mahal.

Seperti yang dinyatakan Nasution (1995: 13), bahwa pendidikan yang diselenggarakan sekolah berbeda dengan jalur pendidikan yang lain, pendidikan yang dikembangkan oleh sekolah lebih dititikberatkan pada pendidikan intelektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai nilai-nilai anti korupsi. Melalui pengetahuan tersebut diharapkan siswa dapat mengaplikasikannya dalam keseharian sehingga menjadi terbiasa untuk tidak bertindak korup.

Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Hasil bervariasi di dapat pada ketiga SD tersebut, yakni:

Tabel 1. Hasil Pendidikan Anti Korupsi

No.	SD	Hasil	Faktor Penyebab
1.	SD N Ngijo 2	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi sudah lumayan baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada beberapa guru yang sudah mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi yang diadakan oleh KPK.</li> <li>2. Ada tindak lanjut dari hasil sosialisasi tersebut yakni pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah dan di kelas.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keteladanan dari para guru.</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi tersebut.</li> </ol>
2.	SD N Sekaran 1	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi sudah lumayan baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD N Sekaran merupakan SD N percontohan di wilayah Kecamatan Gunungpati, sehingga biasanya paling awal mendapatkan informasi baru mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pembelajaran, termasuk pengetahuan pendidikan anti korupsi.</li> <li>2. Ada beberapa guru yang sudah mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi yang diadakan oleh KPK.</li> <li>3. Ada tindak lanjut dari hasil sosialisasi tersebut yakni pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah dan di kelas.</li> <li>4. Keteladanan dari para guru.</li> <li>5. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi tersebut.</li> </ol>
3.	SD N Sekaran 2	Pelaksanaan pendidikan anti korupsi belum berjalan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru-guru belum mendapatkan sosialisasi pendidikan anti korupsi sehingga memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya.</li> <li>2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.</li> </ol>

Siswa-siswa yang sekolahnya sudah melaksanakan pendidikan anti korupsi dapat terlihat lebih berprestasi baik di kelas maupun di luar sekolah. Hal ini disebabkan karena pembiasaan-pembiasaan yang baik akan mendorong siswa untuk melakukan tindakan baik yang maksimal. Seperti yang dinyatakan Nasution maupun Drost (dalam Handoyo, 2009: 34-25), yang sama-sama berpendapat bahwa sekolah berfungsi sebagai pengembang pendidikan intelektual. Namun demikian sekolah atau pendidikan formal sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional secara komprehensif tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga bertujuan membangun karakter atau membangun nilai-nilai kemanusiaan siswa. Pendek kata, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai wahana pendidikan intelektual, tetapi juga sebagai lingkungan subur berkembangnya

pendidikan nilai. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **SIMPULAN**

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SD N di Kecamatan Gunungpati terbagi menjadi dua strategi yakni secara inklusif (disisipkan dalam berbagai mata pelajaran) dan eksklusif (ekstrakurikuler kesiswaan). Pelaksanaannya belum bisa maksimal karena berbagai kendala, diantaranya yakni belum semua guru mengikuti sosialisasi pendidikan anti korupsi sehingga memiliki keterbatasan mengenai pengetahuan dan cara penanaman pendidikan anti korupsi yang efektif dan efisien bagi siswa SD dan minimnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan anti korupsi bagi siswa di SD. Dampak pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SD adalah meningkatnya prestasi siswa baik di kelas maupun di luar kelas, sebab siswa terbiasa untuk bersikap baik, diantaranya jujur, disiplin, peduli, berani, bertanggung jawab dan lain sebagainya.

Saran yang dapat diberikan atas simpulan di atas adalah: Perlunya sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi guru SD N di Kecamatan Gunungpati, perlunya pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi siswa SD dan perlunya keteladanan dari guru di sekolah mengenai pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Widya Karya.
- Nasution, S. 1995. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyanto, Totok. 2005. Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah. *Dalam JPIS Nomor 23 Tahun XII Edisi Juli- Desember 2005*.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah : Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.